ABSTRAK

Organisasi yang menaungi Notaris di Indonesia saat ini dikenal dengan Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disingkat INI). Keberadaan organisasi INI tercantum di dalam Pasal 83 ayat (1) UUJN yang mengatakan bahwa organisasi INI menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.

Jabatan Notaris, walaupun sebagai pejabat umum yang berwenang menghasilkan sebuah produk hukum berupa Akta autentik tidak memperoleh honor dari negara. Dan oleh karenanya, Notaris punya hak untuk menerima honorarium atas jasa hukum yang ia berikan kepada klien. Pasal 36 UUJN, perhitungan besaran honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis. Namun praktik yang terjadi dilapangan, terkadang ada saja Notaris yang tidak menerapkan ketentuan tersebut, sehingga memicu timbulnya persaingan harga antar sesama Notaris. UUJN sangat jelas diatur mengenai tarif maksimal yang boleh ditentukan oleh Notaris dalam setiap transaksi yang dilakukannya bersama klien namun tidak diatur mengenai tarif minimal.

Permasalahan hukum yang berpotensi timbul dari adanya kesenjangan *das sollen* dan *das sein* mengakibatkan timbulnya besaran honorarium yang berbeda-beda antar Notaris satu dengan lainnya.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *non doktrinal empiris* atau yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dalam penulisan hukum ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan melakukan penelitian ini yaitu studi pustaka dan wawancara. Analisis yang digunakan yaitu kualitatif.

Hasil penelitian ini, pada hakikatnya honorarium itu muncul karena adanya kesepakatan kedua belah pihak antara klien atau penghadap dengan Notaris, yang mana penetapannya selain tergantung kepada nilai ekonomis dan sosiologis juga dipengaruhi oleh kondisi dari individu Notaris. Organisasi INI (Ikatan Notaris Indonesia) sebagai satu-satunya organisasi yang menaungi para Notaris di Indonesia berperan untuk menyatukan para Notaris, sehingga antara Notaris satu dan yang lainnya dalam menjalankan jabatannya dapat bersaing secara sehat khususnya dalam hal menentukan honorarium dari setiap akta yang dibuatnya untuk meminimalisir konflik.

Saran penulis dari hasil penelitian ini adalah bahwasannya aturan yang telah dirumuskan baik di dalam UUJN, Kode Etik Notaris dan perundang-undangan terkait lainnya dijalankan oleh setiap individu yang menjalankan jabatannya sebagai Notaris dan hendaknya masing – masing Pengda organisasi INI membuat aturan atau ketentuan mengenai besaran minimal honorarium yang tentunya disesuaikan dengan keadaan di masing – masing daerah agar dapat dijadikan pedoman bagi Notaris baru dan tetap terus berguna walaupun Notaris yang bersangkutan meninggal duni, karena warkah Notaris akan berpindah ke Notaris berikutnya.

Kata kunci : Notaris, Peran INI, Honorarium Notaris, Kesepakatan Notaris dan Klien

ABSTRACT

The organization that oversees Notaries in Indonesia is currently known as the Indonesian Notary Association (hereinafter abbreviated as INI). The existence of the INI organization is stated in Article 83 paragraph (1) of the UUJN which states that the INI organization establishes and enforces the Notary Code of Ethics.

The position of Notary, although as a state official who is authorized to produce a legal product in the form of an authentic Deed does not receive an honorarium from the state. And therefore, Notaries have the right to receive an honorarium for the legal services they provide to clients. Article 36 of the UUJN, the calculation of the amount of honorarium received by a Notary is based on economic and sociological values. However, in practice, sometimes there are Notaries who do not apply these provisions, thus triggering price competition between fellow Notaries. The UUJN is very clearly regulated regarding the maximum rate that may be determined by a Notary in each transaction carried out with a client, but it is not regulated regarding the minimum rate.

Legal problems that potentially arise from the gap between das sollen and das sein result in different honorarium amounts between Notaries. The approach method used in this study is a non-doctrinal empirical or empirical juridical method. The research specifications used in this study are analytical descriptive research. The data collection method in writing this law uses primary data and secondary data. The data collection techniques used in conducting this research are literature studies and interviews. The analysis used is qualitative.

The results of this study, in essence the honorarium arises because of an agreement between the two parties between the client or the person appearing with the Notary, where the determination is not only dependent on economic and sociological values but also influenced by the conditions of the individual Notary. The INI organization (Indonesian Notary Association) as the one and only organization that oversees Notaries in Indonesia plays a role in uniting Notaries, so that between one Notary and another in carrying out their duties can compete healthily, especially in terms of determining the honorarium for each Deed they make to minimize conflict.

The author's suggestion from the results of this study is that the rules that have been formulated both in the UUJN, the Notary Code of Ethics and other related legislation are implemented by each individual who carries out his/her position as a Notary and each Regional Organization of INI should make rules or provisions regarding the minimum amount of honorarium which of course is adjusted to the conditions in each region so that it can be used as a guideline for new Notaries and continue to be useful even if the Notary concerned dies, because the Notary's deed will be transferred to the next Notary.

Keywords: Notary, Role of INI, Notary Honorarium, Notary and Client Agreement